

MEDIA SOSIAL DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA: SEBUAH EKSPLORASI BIBLIOMETRIKA

SOCIAL MEDIA AND THE DEVELOPMENT OF DEMOCRACY IN INDONESIA: A BIBLIOMETRIC EXPLORATION

Indah Nurfitriani¹, Ikbal Maulana², Ramdhan Muhaimin³

^{1,3}Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

²Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta,
Indonesia

Email: indahnfc@gmail.com

ABSTRACT

Social media changes society from passive information consumers to active producers and disseminators of information. This alters political dynamics and influences the development of democracy, as each member of society can freely express their opinions and be directly involved in public discourse. This article presents a bibliometric study to map research on the development of democracy within societies that have intensively used social media. The data subject to this study comprises metadata from articles indexed by Scopus containing the terms "social media", "democracy", "democratization", and "Indonesia". The VOSviewer application is used to map themes and co-authorship relationships between authors' countries of origin, and the LitNetwork application is used to identify clusters of articles based on similarities in the keywords used. This research indicates that social media enhances public participation in political activities; however, this participation can take the form of negative manifestations, such as spreading hatred, disinformation, and identity politics. The widespread distribution of social media does not automatically promote democratization, as elites can also implement authoritarian innovations that limit citizen participation and the emergence of alternative forces with new rules. The maturation of democracy in Indonesia is also determined by the quality and accuracy of information disseminated massively through social media.

Keywords: social media, politics, democracy, freedom of speech, hate speech, disinformation, identity politics

ABSTRAK

Media sosial mengubah peran masyarakat dari konsumen informasi yang pasif menjadi produsen dan penyebar informasi yang aktif. Hal ini mengubah dinamika politik dan memengaruhi perkembangan demokrasi, karena tiap anggota masyarakat bisa leluasa mengekspresikan pendapatnya dan terlibat langsung dalam diskursus publik. Artikel ini memaparkan kajian bibliometrika untuk memetakan riset-riset mengenai perkembangan demokrasi di tengah masyarakat yang telah menggunakan media sosial dengan intensif. Data yang menjadi objek kajian ini adalah metadata dari artikel-artikel yang terindeks Scopus yang mengandung kata-kata “social media”, “democracy”, “democratization”, dan “Indonesia”.

Aplikasi VOSviewer digunakan untuk memetakan tema maupun hubungan kepengarangan (co-authorship) antar-negara asal penulis, serta aplikasi LitNetwork untuk mengidentifikasi kluster-kluster dari artikel berdasarkan kemiripan kata kunci yang digunakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial meningkatkan partisipasi publik dalam kegiatan politik, namun partisipasi ini dapat berwujud dalam bentuk yang negatif, seperti penyebaran kebencian, disinformasi, dan politik identitas. Penyebaran media sosial secara luas tidak serta-merta mendorong demokratisasi, karena kalangan elite juga dapat melakukan inovasi-inovasi otoritarian yang sebenarnya membatasi partisipasi warga dan munculnya kekuatan alternatif dengan aturan-aturan yang baru. Peningkatan kematangan demokrasi di Indonesia juga ditentukan oleh kualitas dan keakuratan informasi yang disebar secara masif melalui media sosial.

Kata kunci: media sosial, politik, demokrasi, kebebasan berpendapat, ujaran kebencian, disinformasi, politik identitas

PENDAHULUAN

Peran warga dalam politik bisa dibaca dari posisi mereka dalam ekosistem media. Di era media konvensional, era media cetak dan elektronik yang bersifat satu arah, warga hanya menjadi sasaran propaganda politisi dan kelompok politik. Mereka bisa memilih suatu media dengan keseluruhan paket informasinya, tetapi tidak bisa turut bersuara di dalamnya, kecuali diizinkan oleh pengelola media tersebut (Maulana, 2017), apakah dimunculkan dalam liputan atau muncul melalui “surat pembaca”.

Kehadiran media sosial membuat warga bisa menjadi pelaku politik yang aktif, karena mereka bisa hadir sebagai produsen dan penyebar informasi yang mereka sukai. Mereka bisa menunjukkan persetujuan atau keberatannya terhadap kebijakan pemerintah, dukungan atau penolakannya terhadap politisi tertentu, menyatakan pandangan politiknya sendiri (Maulana, 2017). Dan semua ini bisa dinyatakan ke publik tanpa perlu repot-repot terjun ke lapangan melakukan demonstrasi, tetapi bisa dari mana saja asal bisa mengakses Internet melalui gawai elektroniknya. Namun, tentu tidak semua orang bisa mendapatkan perhatian luas.

Ada pengguna-pengguna media sosial yang kemudian tumbuh menjadi pesohor mikro (*micro-celebrity*), pemengaruh (*influencer*), ataupun pendengung (*buzzer*).

Kekuatan media sosial dalam pemilihan umum dapat dilihat dari bagaimana media sosial dapat memengaruhi suara pemilih di detik terakhir pencoblosan, seperti yang diterapkan oleh relawan media sosial pasangan Jokowi-Kalla untuk memantau dan mengawasi penghitungan suara. Hal tersebut mencerminkan media sosial saat ini dapat digunakan untuk pemasaran politik karena media sosial telah menjadi ruang publik baru (Munzir et al., 2019).

Media sosial memberi kesempatan kepada siapa pun, juga terhadap kalangan muda, kaum milenial, dan gen Z, yang memiliki kapabilitas yang lebih untuk mengakses dan mendistribusikan informasi yang turut menentukan dinamika politik (Kadir, 2022). Para pesohor dan pemengaruh yang semula tumbuh di dunia hiburan daring, juga telah ditarik oleh berbagai kelompok politik untuk membantu mereka meluaskan pengaruhnya pada para pengguna media sosial. Peran mereka dan media sosial di dunia politik menunjukkan

pergeseran komunikasi yang lebih partisipatif dan interaktif, bukan lagi propaganda satu arah (Simarmata, 2014).

Kemudahan mengakses dan menyebarkan informasi menyebabkan keberlimpahan informasi yang sulit divalidasi kebenarannya satu per satu. Kemudahan bersembunyi di balik akun anonim, juga menyebabkan wacana politik di media sosial sangat dicemari oleh berita palsu dan ujaran kebencian yang menyebabkan masyarakat terbelah. Masyarakat dengan pendidikan rendah akan lebih rentan menerima informasi yang beredar begitu saja. Kebebasan masyarakat dalam berekspresi kerap memicu terjadinya perdebatan yang memanas dengan komentar yang tidak lagi relevan dengan nalar publik hingga kekerasan simbolik dan perbedaan tidak lagi substansial. Konflik di dunia maya juga diperparah karena kelompok-kelompok politik yang bertikai mengerahkan *buzzer*, orang-orang yang menguatkan propaganda politik dengan berlaku seolah-olah pengguna, tetapi melakukannya secara penuh waktu. Berbagai persoalan ini secara hukum bisa diatasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, UU ini kemudian dianggap banyak pihak bermasalah karena sebagian pasalnya yang lentur bisa dengan mudah digunakan untuk membungkam kritik.

Penelitian akan pengaruh media sosial terhadap demokrasi menjadi penting di tengah-tengah kondisi masyarakat yang dibanjiri informasi tanpa henti, yang menyulitkan mereka untuk menyikapinya

secara kritis. Berita palsu, kampanye kotor, dan narasi populisme dengan cepat menyebar dan membelah masyarakat, kemudian membuat perdebatan politik menjadi dangkal yang pada gilirannya memengaruhi kualitas demokrasi Indonesia (Rakhmani & Saraswati, 2021; Tapsell, 2021).

Di sisi lain, kemajuan teknologi dan media sosial memungkinkan masyarakat menjadi jurnalis warga (*citizen journalist*) yang berdampak pada demokratisasi informasi dan membuka kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan pandangannya (Rastiya, 2020). Sementara itu, media massa konvensional, yang diharapkan sebagai sumber berita yang bisa diandalkan, harus menyesuaikan diri dengan kecepatan produksi informasi yang ada di media sosial, dan ini berakibat pada makin longgarnya penjagaan mutu informasi yang mereka sajikan. Kecurigaan pada posisi partisan dari media konvensional juga membuat banyak orang lebih mengandalkan informasi yang dipasok dari lingkungan sosial mereka melalui media sosial, karena lebih sesuai dengan preferensi politik mereka. Ini yang membuat kemudahan dan keluasaan akses informasi tidak serta-merta membuat masyarakat secara politik lebih matang. Hasrat untuk menang, bisa mengalahkan iktikad untuk lebih informatif (Maulana, 2020; Rusadi & Priadji, 2023).

Dalam perkembangan informasi, diperlukan adanya kontrol atau edukasi dari pemerintah untuk menjaga isu atau informasi yang tidak benar, sehingga tidak



dengan mudah dipercaya masyarakat dan mendapatkan pemerataan pengetahuan akan informasi yang sebenarnya. Melekatnya media sosial sebagai instrumen politik berkaitan dengan literasi politik masyarakat, terutama generasi muda yang akan merasakan pengaruh dari pemimpin pilihannya sehingga mereka dapat memahami tahapan dan mekanisme pemilihan, serta memikirkan secara matang pilihan politiknya. Penerapan literasi politik akan memicu sikap kritis terkait pilihan politik dan mengawal atau berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan media sosial sebagai salah satu sumber informasi (Kadir, 2022). Oleh karena itu, pendidikan politik memiliki peran penting baik dalam 1) mencegah polarisasi politik yang mengancam generasi muda melalui informasi di media sosial; 2) membangun politik yang sehat; maupun 3) memberi pembekalan pemahaman bagi masyarakat, termasuk generasi muda untuk mengetahui proses pemilihan dan menciptakan politik yang sehat dan berkualitas, tanpa politik uang ataupun polarisasi yang memecah masyarakat (Alamri et al., 2023).

Artikel ini mengkaji riset-riset terdahulu mengenai penggunaan media sosial dan pengaruhnya bagi demokrasi di Indonesia dengan metode bibliometrika terhadap artikel-artikel yang terindeks di Scopus. Dengan aplikasi VOSviewer, tema dan kolaborasi antar-negara dalam riset mengenai hubungan media sosial dan demokrasi bisa divisualisasikan. Sedangkan, dengan aplikasi LitNetwork berbagai artikel ini bisa dikelompokkan ke dalam klaster-klaster yang menunjukkan kemiripan *keyword*, yang berarti juga kemiripan tema.

METODOLOGI

Bibliometrika merupakan cara penelitian untuk memetakan riset-riset yang sudah ada dengan mengkaji hasil publikasinya. Dengan bibliometrika, persoalan-persoalan yang dibahas (yang terlihat sebagai relasi antar-kata kunci) bisa dengan mudah dikenali, demikian juga kerja sama antar-penulis ataupun penulis-penulis karya ilmiah yang berpengaruh di suatu topik riset dapat dengan mudah dikenali dan dianalisis. Bibliometrika ini menjadi metode penting ketika orang hendak mengenali persoalan riset yang baru.

Bibliometrika awalnya bertujuan memantau dan memodelkan penyebaran pengetahuan, terutama dalam ilmu pengetahuan. Pada 1970-an dan 1980-an, bibliometrika berkembang menjadi alat evaluasi kuantitatif yang penting dalam riset ilmiah. Pada 1990-an, penerapan bibliometrika mulai beralih dari tingkat nasional ke tingkat individu ilmuwan. Tokoh penting dalam perkembangan bibliometrika termasuk D. de Solla Price, Eugene Garfield, dan Robert K. Merton. Meskipun bibliometrika mengukur frekuensi publikasi, evaluasi kualitas dan signifikansi karya ilmiah membutuhkan metode yang lebih kompleks (Ball, 2017; Salini, 2016).

Riset bibliometrika mengolah metadata publikasi ilmiah dari basis data publikasi. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data dari Scopus. Dataset dikumpulkan dari Scopus dengan kata pencarian “Indonesia” dan “*democracy OR democratization*” pada batasan waktu 2015–2023 dan *refine search* “social media”, menghasilkan 109 dokumen yang diekspor dalam bentuk CSV. Kemudian jika disatukan, kata pencariannya adalah:

Indonesia AND (democracy OR democratization) AND "social media"

Batasan waktu data yang diambil adalah tahun 2015–2023 dan menghasilkan dataset dengan 109 dokumen. Selain informasi dasar tentang penulis dan afiliasinya, dataset ini juga berisi informasi tentang kata kunci dari karya tulis, jumlah sitasi terhadap karya tersebut, serta referensi yang digunakan di tiap tulisan. Data ini selanjutnya diolah dengan aplikasi VOSviewer untuk memetakan jaringan kata kunci sehingga dapat mengetahui topik-topik karya tulis serta jaringan afiliasi negara antar-penulis (Prasetyo, 2021; Van Eck & Waltman, 2010). Selain itu, dengan menggunakan VOSviewer, jaringan kerja sama antar-penulis (menjadi *co-author* dalam tulisan yang sama) dari berbagai negara juga bisa diidentifikasi.

DATA DAN DISKUSI

Teknologi media selalu menentukan dinamika politik, karena dengan teknologi ini, jangkauan kampanye, propaganda, atau diskursus publik dapat melampaui batas-batas ruang fisik. Namun, peralihan dari teknologi media analog ke media digital lebih bersifat transformatif, karena konten dalam penggunaan teknologi digital bisa diolah untuk berbagai keperluan, dan setiap bentuk tindakan atau interaksi menghasilkan data, yang memudahkan pemantauan (Mahesa & Irwansyah, 2022; Maulana, 2019). Media digital memungkinkan pembentukan ruang-ruang publik di mana orang-orang yang tidak pernah bertemu secara langsung, bisa dengan mudah bertemu atau saling menemukan. Namun, media digital juga

memudahkan para pengguna terkotak-kotak dalam kelompoknya masing-masing, yang di dalamnya mereka saling menguatkan prasangka buruknya terhadap pihak-pihak di luar kelompoknya (Lim, 2017).

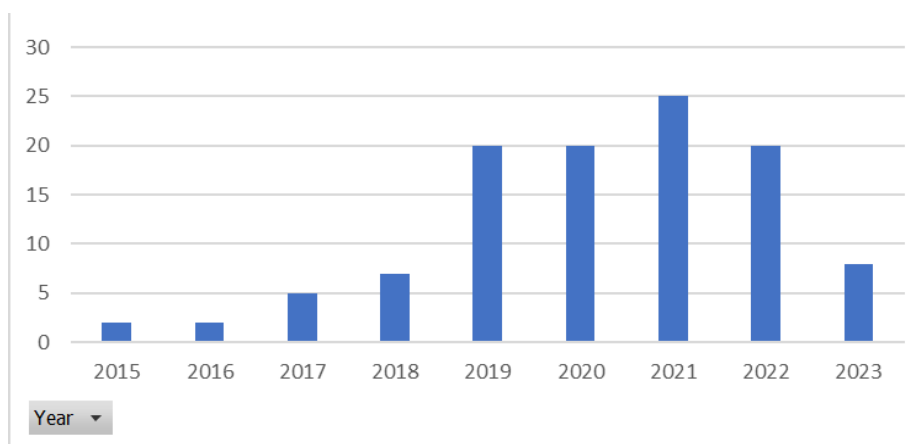
Sebelum hadirnya media sosial, masyarakat dunia berkomunikasi melalui blog, forum, *MySpace*, ataupun *Friendster* (Fatmawati, 2021). Facebook pada awalnya dikhususkan bagi mahasiswa Universitas Harvard hingga pada akhirnya digunakan di seluruh dunia sampai saat ini karena mempunyai fitur yang komunikatif, mudah, dan efisien. Selain itu, Facebook juga digunakan oleh tokoh-tokoh dunia untuk berkomunikasi dengan penggemarnya sehingga menarik minat masyarakat luas untuk ikut menggunakannya. Eksistensi Facebook kemudian bersaing dengan berbagai platform media lain yang saat ini telah hadir dan erat dalam keseharian masyarakat, seperti Instagram, Tiktok, ataupun Twitter (Kartini et al., 2022; Nugraha et al., 2022). Transformasi digital memiliki peran penting pada kehidupan manusia yang menuntut manusia untuk mempunyai keahlian baru, menjadi bidang pembelajaran baru, dan juga membuka kesempatan lapangan kerja baru yang dapat mendorong proses kerja baru dalam mengelola data atau informasi. Kemampuan atau keterampilan di bidang dunia digital dilihat sebagai keunggulan karena makin dibutuhkan oleh berbagai pihak untuk beradaptasi dan tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi yang kian pesat.



Media sosial menjadi unsur penting yang tidak lepas dari kehidupan manusia dan telah melekat dalam diri setiap manusia di dunia saat ini, karena melalui media sosial, semua informasi dapat diakses dan dinikmati dengan mudah dalam waktu yang singkat. Peristiwa di suatu negara dapat diketahui masyarakat global di waktu yang bersamaan di belahan dunia lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa media sosial telah melampaui batas ruang dan waktu dalam menyebarkan data maupun informasi. Keberadaan media sosial juga mendorong perubahan pola interaksi antar individu yang dapat dilakukan kapan saja tanpa harus bertemu secara langsung. Hal tersebut tentunya dapat menghemat waktu dan tenaga yang akan dikeluarkan dibandingkan dengan bertemu secara langsung. Perubahan interaksi dapat dilihat saat media sebelumnya hanya menciptakan proses informasi yang diberikan oleh komunikator kemudian diterima oleh komunikan. Media sosial tanpa kita sadari memiliki potensi pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini publik, terutama dalam konteks politik dan isu-isu kontroversial. Penggunaan media sosial yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat

membuat siapa saja dapat mengunggah video atau berita di berbagai platform media sosial, sehingga hal tersebut kemudian mendorong siapa saja dapat menjadi jurnalis. Namun, adanya transformasi media membuat fakta yang ada tidak dapat diketahui kebenarannya sehingga sulit membedakan mana berita yang benar dan palsu, serta memicu kebisingan akibat informasi yang terus bertambah dan tidak ada habisnya (Simarmata, 2014).

Makin pentingnya media sosial dalam politik dan dampaknya pada demokrasi ditunjukkan oleh peningkatan jumlah publikasi per tahun tentang topik ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1. Jumlah publikasi dengan tema media sosial, politik, dan demokrasi di Indonesia, yang digunakan sebagai data awal adalah publikasi pada tahun 2015, yang kemudian terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Sedangkan data terakhir, yaitu pada tahun 2023, menurun karena pengambilan data dilakukan sekitar pertengahan 2023, sehingga belum semua publikasi pada tahun tersebut tercatat.

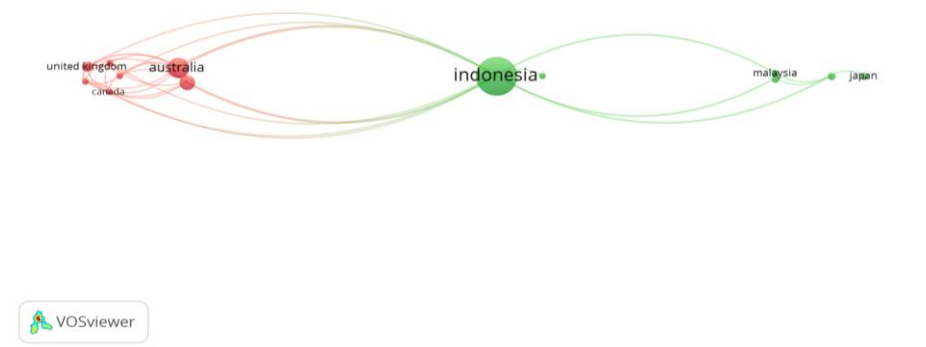


Sumber: Scopus

Gambar 1. Jumlah Penerbitan Per Tahun

Tema terkait media sosial, politik, dan demokrasi di Indonesia juga menarik perhatian ilmuwan dari berbagai negara. Meskipun dalam dataset, jumlah penulis asal Indonesia masih tergolong yang paling

besar, mereka juga bekerja sama atau menulis bersama dengan penulis-penulis lain dari Australia, Inggris, Malaysia, Jepang, ataupun negara lain sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 2.



Sumber: Scopus

Gambar 2. Hubungan Kerja Sama Penulisan dari Penulis-Penulis dari Berbagai Negara

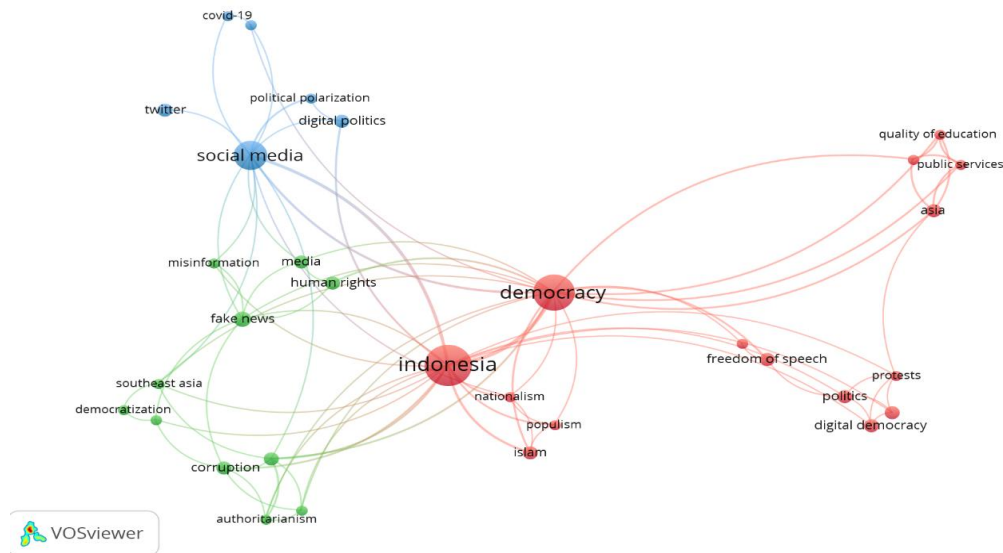
Topik-topik pembicaraan dalam dataset yang diambil dari Scopus ditunjukkan oleh Gambar 3 yang memvisualisasikan kemunculan bersama antar-kata kunci (*keyword co-occurrence*). Ada tiga klaster kata kunci yang ditunjukkan oleh warna merah, biru, dan hijau. Pada klaster berwarna merah, terlihat pembahasan mengenai: 1) ketegangan antara nasionalisme, Islam, dan populisme; 2) demokrasi digital; 3) kebebasan berbicara dalam politik yang diperlukan untuk mengekspresikan protes; serta 4) persoalan kualitas pendidikan. Selain itu, artikel yang memiliki kata kunci ini juga ada yang mendiskusikan penerapan UU ITE, yang seharusnya hanya dimaksudkan

untuk mengatasi berita palsu dan ujaran kebencian, tetapi malah kerap digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara. Sentimen agama dan populisme juga merupakan sentimen yang paling banyak dieksploitasi untuk menggagalkan dukungan politik.

Benturan antar-pendukung kelompok politik terlihat di media sosial, terutama Twitter, seperti yang ditunjukkan oleh klaster biru. Polarisasi politik sangat terlihat di Twitter. Para penggunanya dengan mudah terlibat dalam *twitwar*, yang lebih sering berbentuk pertukaran tuduhan atau ujaran kebencian, daripada adu gagasan. Di Twitter, terjadi saling lempar gagasan, namun tanpa dialog. Karena

masing-masing kelompok pendukung hanya memperhatikan dan saling menguatkan pesan-pesan dari

kelompoknya sendiri. Tidak ada upaya saling memahami.



Sumber: Scopus
Gambar 3. Jejaring Kata Kunci

Sementara itu, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang menuai respons pro dan kontra dari masyarakat disampaikan melalui media sosial. Sedangkan pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19 tahun 2021 tidak menghentikan masyarakat mengekspresikan pendapatnya melalui Twitter sebagai alternatif, terkait dengan isu Tes Wawasan Kebangsaan KPK (klaster biru). Selain itu, media sosial juga mendorong masuknya politik dalam dunia digital yang memicu disinformasi dan memengaruhi pengambilan keputusan politik sehingga dibutuhkan strategi efektif untuk memerangi penyebaran hoaks. Kemudian maraknya penggunaan media sosial dalam pemilihan meningkatkan polarisasi masyarakat dan membentuk nasionalisme tribal. Sedangkan konsolidasi media hanya menjadi ilusi, karena

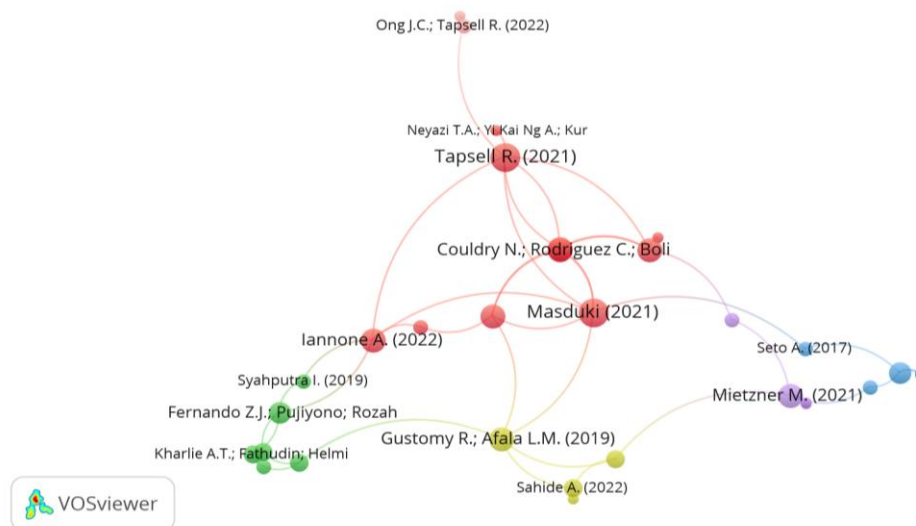
banyaknya pilihan media yang dimiliki beberapa pihak saja, sehingga mengurangi kredibilitas informasi yang disampaikan dan memungkinkan terjadinya penyebaran berita palsu karena informasi yang disampaikan tersebut tidak dapat divalidasi satu per satu (klaster hijau). Informasi menyebar luas tanpa henti membuat maraknya berita palsu yang memicu terjadinya disinformasi di masyarakat sebagai salah satu dampak penggunaan media untuk kepentingan politik. Pemerintahan otoriter memberi peluang bagi praktik korupsi dan pada banyak kasus politik identitas yang mengatasnamakan agama (klaster hijau).

Klaster Artikel

Grafik *keyword co-occurrence* yang ditunjukkan Gambar 3 hanya menunjukkan hubungan antar-kata kunci, yang kurang lebih menggambarkan tema-tema dalam

keseluruhan data. Namun, gambar tersebut tidak langsung merujuk ke artikel-artikelnya, sehingga menyulitkan penelusuran mengenai artikel-artikel mana saja yang berbicara tentang tema-tema tersebut. Aplikasi Python LitNetwork

digunakan untuk mengklaster artikel-artikel berdasarkan tingkat kesamaan kata-kata kuncinya. Melalui proses pengolahan data dengan LitNetwork, diperoleh 5 klaster dengan perincian masing-masing klaster sebagai berikut.



Sumber: Scopus

Gambar 4. Klaster Artikel Berdasarkan Kemiripan Kata Kunci

Klaster Merah: Korelasi Media dan Politik

Berdasarkan Gambar 4, artikel klaster merah membahas seputar perkembangan media dan teknologi yang memiliki peran atau pengaruh penting pada dunia politik dewasa ini. Diawali dengan artikel terkait perkembangan media sebagai sarana komunikasi hingga saluran perjuangan sosial, namun tidak diiringi dengan akses media digital yang merata dan dampaknya terhadap kemajuan sosial ataupun dalam upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Couldry et al., 2018).

Selanjutnya, terdapat dua artikel dengan fokus pada hilangnya hak asasi atau hak sipil masyarakat atas informasi yang dapat dipercaya dan diandalkan akibat terjadinya pergeseran industri media Indonesia dari pembangunan masyarakat menjadi keuntungan. Hal tersebut terjadi karena konsolidasi, transformasi, serta liberalisasi media yang termasuk pelanggaran etika jurnalistik karena mengakibatkan media menjadi bias (Maksum & Azizah, 2019; Sukmayadi, 2019). Serupa dengan dua artikel sebelumnya, artikel ini membahas penurunan kebebasan pers dan ekspresi akibat kontrol media, di mana Indonesia,

Filipina, dan Thailand memanfaatkan media untuk disinformasi, propaganda perang, maupun kendali media untuk mengontrol opini publik (Iannone, 2022). Di sisi lain, kontrol media dapat dilakukan oleh pihak non-negara maupun masyarakat yang membatasi media dan jurnalis dengan komentar kontroversi, *doxing*, hingga adanya *buzzer* untuk memanipulasi informasi atau berita kritis tokoh politik tertentu, sedangkan pemanfaatan media sosial dalam kampanye pemilihan umum di beberapa negara Asia Tenggara mengarah pada politik identitas dan disinformasi (Masduki, 2021; Tapsell, 2021).

Media sosial mendorong transformasi politik pada saat teknologi berkembang di Indonesia dan mendukung komunitas virtual pasca gerakan tahun 1998, serta saat media sosial mulai membentuk partisipasi politik dalam pemilihan tahun 2008 yang cenderung mempolarisasi dan memecah masyarakat (Septiani, 2019). Artikel sebelumnya mencerminkan dinamika atau kompleksitas hubungan sistem media dengan politik dan ekonomi sejak reformasi, di mana terdapat media sosial yang terpapar informasi palsu, yaitu *WhatsApp* dan *Instagram* berbeda dengan *Twitter* dan *Facebook* yang berhasil melawan informasi palsu (Neyazi et al., 2022; Suyanto, 2018). Media sosial juga dapat memicu perselisihan dan ketegangan, seperti yang terjadi antara masyarakat Muslim Indonesia melalui ketidaksetujuan terhadap pemerintah, di mana masyarakat lebih memilih mendapatkan informasi daripada membagikannya, dan hal tersebut tidak berpengaruh pada pengalaman perselisihan politik media sosial (Latifa et al., 2019).

Klaster Hijau: Pembatasan Kebebasan Berekspresi

Klaster hijau membahas tentang kebebasan berekspresi yang menjadi ujaran kebencian sehingga pemerintah mengambil langkah menetapkan UU ITE dengan problematika dalam penerapannya di Indonesia. Kebebasan berekspresi tanpa batasan dapat berubah menjadi kebebasan menyampaikan ujaran kebencian yang memicu sektarianisme dan rasisme hingga menjadi *twitwar* di *Twitter* yang kemudian disebarluaskan ke media sosial lain. Hal tersebut menyebabkan spiral kecemasan dengan faktor utama pemicu *twitwar*, yaitu konten kontroversial, provokasi atau ungkapan kebencian, dan perbedaan pilihan politik di dunia nyata (Syahputra, 2019).

Di sisi lain, terdapat tiga artikel terkait perkembangan teknologi yang dianggap mempermudah kritik kepada pemerintah. Namun, UU ITE dimaknai secara keliru karena dinilai mengurangi demokrasi, merusak penegakan hukum, serta membuat masyarakat merasa menjadi korban karena peraturan tersebut membatasi kreativitas dan kebebasan berekspresi. Tujuan pemerintah menetapkan UU ITE adalah mewujudkan kebebasan berpendapat yang bebas tetapi dibatasi agar menciptakan ketertiban serta mewujudkan masyarakat yang bertanggung jawab dalam menyampaikan ekspresi dan pendapatnya, sebagaimana didukung artikel lainnya yang memberi gambaran pentingnya UU ITE untuk mewujudkan demokrasi di negara hukum (Fernando et al., 2022; Gorda et al., 2018; Kharlie & Helmi, 2019; Setyaningrum et al., 2022; Talani & Towadi, 2022).

Klaster Ungu: Upaya Otoritarian dan Politisasi Agama

Klaster ungu berisi pembahasan terkait upaya-upaya otoritarian dan politisasi agama yang menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Klaster yang diawali dengan artikel tentang persyaratan dalam pembentukan partai politik, penetapan ambang batas parlemen, serta penetapan ambang batas bagi capres maupun kepala daerah, kemudian menjadi inovasi otoritarian dengan kebijakan pendanaan mandiri partai politik yang menyebabkan dominasi kekuasaan pada pihak tertentu (Mietzner, 2020). Sehubungan dengan artikel-artikel berikut yang saling berkaitan, di mana pengaruh agama mayoritas di Indonesia digunakan dalam perpolitikan, seperti: 1) pengaruh politik MUI sejak rezim Soeharto yang berdampak pada stagnasi demokrasi dengan meminta otoritas perwakilan melalui sikap anti-pluralisme dan mengancam keseimbangan agama dengan negara; 2) debat Ahmadiyah di Indonesia yang membuat pertanyaan tentang hak asasi minoritas agama; 3) upaya pengguna internet menghindari polarisasi politik di media sosial, walaupun tidak berarti bahwa polarisasi yang ada sudah berakhir dan bukan lagi menjadi faktor yang mengancam demokrasi; 4) polarisasi politik yang memecah masyarakat dan memengaruhi peran masyarakat sebagai pertahanan demokrasi terakhir; serta 5) memvalidasi tindakan pihak eksekutif yang tidak liberal sehingga mengurangi sumber daya aktivis masyarakat sipil di Indonesia dan menyebabkan kemunduran demokrasi

(Mietzner, 2021; Schäfer, 2015, 2019; Syahputra et al., 2023).

Di sisi lain, perkembangan sosial dan ekonomi menyebabkan pergeseran struktur sosial maupun tekanan global untuk reformasi ekonomi serta politik. Hubungan masyarakat sipil dan negara dalam proses demokratisasi sering kabur. Sebagian kelompok masyarakat sipil tidak mendukung proses demokratisasi, bahkan mendukung otoritarianisme, atau melemahkan demokrasi sejak awal (Ufen, 2023).

Klaster Biru: Gerakan Masyarakat

Secara keseluruhan, klaster biru berisi artikel dengan pembahasan baik terkait: 1) gerakan masyarakat sebagai wujud partisipasi politik untuk membawa perubahan sosial dengan memanfaatkan media sosial, meskipun tidak sepenuhnya berhasil karena membutuhkan pengalaman dan kebijaksanaan; maupun 2) pengaruh gerakan politik masyarakat pada demokrasi ke depannya. Dalam klaster biru, terdapat tiga artikel yang pembahasannya saling berkaitan, di antaranya: 1) faktor keyakinan mahasiswa untuk ikut serta dalam gerakan “Save KPK” yang berhubungan erat dengan pemanfaatan media digital untuk mengorganisir gerakan masyarakat yang mendorong partisipasi politik masyarakat, baik melalui platform media sosial maupun demonstrasi dengan tujuan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat; 2) keyakinan dalam menciptakan perubahan sosial dan politik; serta 3) upaya dalam mewujudkan politik yang lebih baik bagi Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk melawan penyebaran disinformasi,



memperkuat partisipasi politik, serta menjaga demokrasi (Saud & Margono, 2021; Suwana, 2020). Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan Twitter sebagai platform untuk menyampaikan pendapat atau pandangan politiknya karena adanya pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat mencerminkan evolusi bentuk demokrasi dan aktivisme pada ranah digital, khususnya pada gerakan anti-korupsi (Sumartias et al., 2023).

Hal yang berbeda terjadi pada artikel yang mengkritik keberhasilan aktivisme masyarakat dalam membela beberapa undang-undang, kebijakan, dan institusi tertentu. Pelemahan KPK mencerminkan kerentanan lembaga demokratis yang dipercaya dan memiliki kekuatan atau kapabilitas besar pada kepentingan tertentu, sehingga sebagian masyarakat membenarkan bahwa pelemahan KPK adalah salah satu bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia (Mudhoffir, 2023). Sementara itu, penelitian lainnya melihat perlunya keterampilan pemanfaatan media digital dan populisme yang harus diperkuat dengan pengalaman ataupun kebijaksanaan, serta pentingnya membahas bentuk masa depan demokrasi digital pasca kepemimpinan otoriter (Seto, 2017).

Klaster Kuning: Dinamika Demokrasi di Era Jokowi

Klaster kuning mengindikasikan bahwa terdapat artikel yang di antaranya membahas: 1) prediksi pemilu tahun 2019–2024 berdasarkan analisis sentimen opini publik di Twitter; 2) penurunan demokrasi terkait dengan kegagalan konsolidasi demokratis yang ditandai dengan intervensi pemerintah pada pembuatan aturan hukum, khususnya pada aspek masyarakat sipil dan politik, melalui intimidasi dan

penangkapan pihak yang dianggap berbahaya karena mengkritik pemerintah, serta melalui penerapan hukum represif untuk menjaga stabilitas politik dan implementasi agenda pembangunan agar berjalan sesuai keinginan (Kristiyanti et al., 2019; Asrinaldi & Yusoff, 2023). Kemudian, kritik pada pemerintahan Jokowi sebagian besar dinilai tidak substantif, di antaranya adalah: 1) Jokowi merupakan salah satu kandidat presiden dalam pemilihan tahun 2019 yang berhasil menang dengan memanfaatkan media digital untuk pencitraan kepada masyarakat; serta 2) Jokowi menjadi satu-satunya Presiden Indonesia yang bukan berasal dari kalangan elite ataupun pemimpin partai, sehingga sempat dihadapkan pada masalah konsolidasi kekuasaan, namun berhasil melewati tantangan dalam prosesnya menjadi presiden dengan upaya memanfaatkan momentum kedekatan dengan masyarakat (Gustomy & Afala, 2019; Sahide, 2022).

Artikel yang Paling Berpengaruh

Umumnya, artikel ilmiah memiliki daftar rujukan atau referensi yang menunjukkan pengembangan ilmu sebagai proses kumulatif yang dilakukan oleh komunitas ilmiah walaupun mereka bekerja secara terpisah. Scopus memberikan daftar referensi tersebut di metadatanya, yang memungkinkan kita melakukan analisis terhadap artikel-artikel yang berpengaruh terhadap artikel-artikel dalam dataset. Dengan VOSviewer, jejaring artikel yang paling banyak dirujuk oleh dataset bisa ditelusuri. Garis yang menghubungkan dua artikel mendapatkan bobot sebesar jumlah artikel dalam dataset yang sama-sama merujuk kedua artikel tersebut. Makin banyak artikel yang sama-sama merujuk dua artikel tersebut, makin besar bobotnya,

dan makin dekat jarak keduanya. Dengan menggunakan fitur *co-citation* yang ada di VOSviewer diperoleh Gambar 5, yang

menunjukkan karya-karya terpenting yang dirujuk di dalam dataset.



Sumber: Scopus

Gambar 5. Artikel yang Paling Berpengaruh atau Paling Banyak Disitasi

Artikel *Indonesia's Democratic Stagnation: Anti-Reformist Elites and Resilient Civil Society* membahas stagnasi demokrasi di Indonesia dengan adanya upaya pembatalan reformasi pada tahun 1990 dan awal tahun 2000, serta konsolidasi demokrasi di Indonesia yang terhenti pada periode 2005–2006. Hal tersebut serupa dengan pembahasan hubungan antar artikel pada Klaster 4 mengenai dinamika demokrasi di era Jokowi, yang dinilai mengalami penurunan demokrasi terkait konsolidasi demokratis yang gagal. Kegagalan konsolidasi demokratis tersebut ditandai dengan intervensi pemerintah pada pembuatan aturan hukum untuk mengatur pihak yang mengkritik pemerintah. Di mana langkah tersebut dipandang oleh pemerintah sebagai penerapan hukum represif untuk menjaga stabilitas politik serta implementasi agenda pembangunan sesuai dengan yang telah direncanakan. Hasil jajak pendapat

menunjukkan tidak ada kaitan antara stagnasi demokrasi dengan ketidakpuasan masyarakat akan buruknya pemerintahan pasca otoriter. Elite anti reformis menjadi kekuatan utama dalam upaya mewujudkan tujuan anti reformis tersebut, sementara masyarakat menjadi pembela demokrasi (Mietzner, 2012).

Kemudian, *Oligarchy and Democracy in Indonesia* karya dari Jeffrey A. Winters membahas dampak oligarki pada ekonomi dan politik Indonesia yang akan mengalami kesenjangan karena ketimpangan kekayaan ekstrem dalam masyarakat. Kekuatan oligarki telah mendominasi dan mendistorsi sehingga mengakibatkan lemahnya sistem hukum, organisasi, dan partisipasi masyarakat sipil di Indonesia (Winters, 2013). Hal tersebut mendorong gerakan masyarakat untuk melawan pihak elite politik sebagaimana dibahas dalam Klaster 3. Terdapat beberapa

artikel yang paling banyak dirujuk sehingga memiliki pengaruh lebih besar dari artikel lainnya dalam dataset dengan pembahasan utama terkait kegiatan atau upaya yang memengaruhi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Artikel pertama adalah *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution* karya Rose Tapsell, yang membahas transformasi masyarakat yang makin beragam dan media digital sebagai tempat kontestasi antara oligarki yang besar dan berkuasa, serta kepemilikan media oleh beberapa pemilik untuk mendukung kepentingan pribadi, seperti kepentingan politik atau bisnis yang mengancam informasi dan komunikasi di Indonesia (Tapsell, 2017). Sementara, pada *Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia*, Merlyna Lim membahas bahwa kampanye Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 menjadi contoh praktik politik di era disinformasi yang menggunakan media sosial sebagai tempat ujaran kebencian dan alat politik, sehingga mendorong berkembangnya sektarianisme dan rasisme dengan memanfaatkan *buzzer* hingga selebriti untuk mempromosikan diri. Interaksi antara pengguna media sosial dan algoritma konten yang diminati saling memengaruhi pembentukan nasionalisme mereka sendiri atau kelompok yang mewakili mereka berdasarkan identitas politik atau karakteristik tertentu, serta merasa lebih baik dibandingkan kelompok lain. Namun, media sosial juga memfasilitasi jaringan-jaringan kecil terkait isu keadilan, kesetaraan, dan pluralisme di luar politik identitas untuk dapat terus berkembang (Lim, 2017). Kedua artikel tersebut berkaitan dengan pembahasan pada Klaster 0 mengenai “Korelasi Media dan Politik”,

di mana media telah berkembang menjadi tempat kontestasi politik yang dipengaruhi oleh kepemilikan media, serta dimanfaatkan sebagai media kampanye yang telah memperkeruh disinformasi yang beredar, memicu ujaran kebencian, mengakibatkan polarisasi masyarakat, bahkan bisa menghilangkan hak masyarakat atas informasi yang dapat dipercaya dan diandalkan karena media menjadi bias.

Hal yang serupa ditunjukkan pada artikel *Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline* karya Thomas P. Power yang membahas kemunduran institusi demokrasi di Indonesia selama kepemimpinan Presiden Jokowi menuju pencalonan kembali tahun 2019. Hal tersebut berkaitan dengan legitimasi aliran Islam politik yang konservatisme dan anti-pluralisme, manipulasi, serta represi atas oposisi yang meningkat secara terbuka dengan kontes antara kandidat Jokowi dan Prabowo, di mana status quo demokrasi yang tidak diperhatikan sehingga memperburuk kualitas demokrasi (Power, 2018).

Dua karya Marcus Mietzner ini mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu *Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia*, yang menjelaskan bahwa peningkatan kampanye populis secara global membuat perdebatan dalam pertahanan diri negara demokrasi atas tantangan yang ada. Mobilisasi Islam dan populis di Jakarta pada akhir tahun 2016 direspons oleh Presiden dengan menerapkan kriminalisasi terhadap kelompok populis yang melanggar norma hukum dan kebijakan, di mana tindakan tersebut dianggap tidak tepat sehingga

pemerintah harus melindungi status quo demokrasi dari ancaman serangan populis yang mengakibatkan demokrasi Indonesia perlahan melemah (Mietzner, 2018). Sementara, dalam *Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation*, kolaborasi antara Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi melihat beberapa ahli memperdebatkan penyebab demonstrasi massal yang dilakukan oleh kelompok Islam tahun 2016. Melalui analisis data jajak pendapat, ditunjukkan bahwa sikap konservatif umat Islam di Indonesia mengalami penurunan sebelum mobilisasi. Namun, sekitar seperempat umat Islam mendukung agenda sosio-politik Islam. Konstituen inti Muslim konservatif telah meningkatkan kualitas diri sehingga meningkatkan kapasitas organisasi mereka. Mobilisasi terjadi ketika umat Islam konservatif merasa dikucilkan dari pemerintahan setelah berakhirnya satu dekade akomodasi (Mietzner & Muhtadi, 2018).

Ketiga artikel di atas serupa dengan pembahasan Klaster 2 terkait “Upaya Otoritarian dan Politisasi Agama”, di mana diawali topik penetapan persyaratan dalam pembentukan partai politik, penetapan ambang batas parlemen, serta penetapan ambang batas bagi capres maupun kepala daerah, yang dinilai telah mendorong dominasi kekuasaan pada pihak tertentu. Kemudian, politisasi agama mayoritas di Indonesia dalam perpolitikan, seperti pengaruh politik MUI sejak rezim Soeharto yang berdampak pada stagnasi demokrasi dengan meminta otoritas perwakilan

melalui sikap anti-pluralisme dan mengancam keseimbangan agama dengan negara. Dalam karyanya yang berjudul “*Democracy for Sale*”, Aspinall menganalisis kampanye pemilu dan intrik di balik layar yang menilai jaringan informal dan strategi politik yang membentuk akses terhadap kekuasaan dan hak istimewa dalam politik Indonesia kontemporer dengan praktik klientelisme, pembelian suara, penjualan pengaruh, manipulasi program pemerintah, serta kontestasi politik. Melalui peran agama, serta kekerabatan dan identitas, proses dan alasan sistem klientelisme di Indonesia muncul. Sedangkan variasi dalam pola dan intensitas klientelisme untuk memegang kendali atas sumber daya negara dibandingkan dengan praktik politik di India dan Argentina (Aspinall & Berenschot, 2019). Artikel tersebut serupa dengan pembahasan pada Klaster 5 mengenai “Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia”, di mana pemilihan umum yang kompetitif bersamaan dengan tren illiberal terlihat kontradiktif walaupun sebenarnya mereka saling terikat. Kemudian dipicu oleh peran Bawaslu dalam pemilu dan partisipasi masyarakat terhadap konsolidasi demokrasi, serta fenomena yang mewarnai pemilihan umum di Indonesia untuk memenangkan suara terbanyak, Bawaslu memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi masyarakat dan pihak yang terlibat atas kejahatan dalam pemilihan.

KESIMPULAN

Melalui kajian bibliometrika ini, riset-riset mengenai kaitan antara media sosial, politik, dan demokrasi di Indonesia bisa



dipetakan. Media sosial memberi peluang bagi siapa pun untuk menyuarakan pendapatnya. Namun, ketiadaan penyaring (filter) membuat apa pun bisa disebar. Dengan menggunakan akun palsu, orang juga bisa menyebar fitnah atau ujaran kebencian tanpa khawatir menghadapi konsekuensi hukum.

Kemudahan berinteraksi dan mencari informasi yang dimungkinkan oleh teknologi media sosial, tidak membuat orang-orang saling memahami. Hasrat untuk menang dalam persaingan politik, dan kemudahan menyebarkan informasi, justru menyuburkan penyebaran sentimen negatif terhadap dan berita palsu tentang pihak lain. Dalam konteks politik, media sosial tidak meningkatkan kohesi masyarakat secara keseluruhan, tetapi justru membuat mereka makin terpolarisasi. Mereka lebih cenderung berkelompok dengan orang-orang sepemikiran, yang dalam politik berakibat saling menguatkan prasangka negatif tentang pihak lain. Sementara upaya untuk mengatasi masalah ini melalui UU ITE dituding tidak mengatasi persoalan, tetapi justru menambahnya, karena UU ini mengancam kebebasan berpendapat.

Riset-riset mengenai topik di atas bisa dikatakan masih dalam tahap awal, karena media sosial merupakan media baru. Masyarakat dan kelompok-kelompok politik masih belajar memanfaatkannya. Sementara teknologi juga terus berkembang, memunculkan fungsi-fungsi baru, dan akan memengaruhi dinamika politik secara berbeda pula. Melalui kajian bibliometrika ini telah dipetakan berbagai persoalan demokrasi di era digital, yang bisa menjadi fokus bagi penelitian-penelitian berikutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Alamri, J., Bena, M., Katili, Y., & Tabo, S. (2023). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Instrumen Media Sosial. *Journal Governance and Politics*, 3(1), 53–62. <https://jurnal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/304>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Asrinaldi, & Yusoff, M. A. (2023). Power consolidation and its impact on the decline of democracy in Indonesia under President Jokowi. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2232579. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2232579>
- Ball, R. (2017). *An introduction to bibliometrics: New development and trends*. Chandos Publishing.
- Couldry, N., Rodriguez, C., Bolin, G., Cohen, J., Goggin, G., Kraidy, M., Iwabuchi, K., Lee, K.-S., Qiu, J., Volkmer, I., Wasserman, H., Zhao, Y., Koltsova, O., Rakhmani, I., Rincón, O., Magallanes-Blanco, C., & Thomas, P. (2018). Media and Communications*. In *Rethinking Society for the 21st Century: Report of the International Panel on Social Progress: Volume 2: Political Regulation, Governance, and Societal Transformations*, 2, 523–562. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108399647.006>

- Fatmawati, N. (2021, November 2). Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/pengaruh-positif-dan-negatif-media-sosial-terhadap-masyarakat.html>
- Febriansyah, M., Ismail, M. T., & Noor, N. M. (2020). Competing not complementing: KPU, Bawaslu, and the dynamic of election monitoring in PEMILU 2019. *Asian Journal of Political Science*, 8(3) 275–293. <https://doi.org/10.1080/02185377.2020.1781670>
- Fernando, Z. J., Pujiyono, Rozah, U., & Rochaeti, N. (2022). The freedom of expression in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2103944. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>
- Gorda, A. A. A. S. R., Arsawati, N. N. J., & Antari, P. E. D. (2018). Limitations of freedom of speech in a democratic government: A contemporary analysis in Indonesia case. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9(8), 868–874. https://iaeme.com/Home/article_id/IJMET_09_08_093
- Gustomy, R., & Afala, L. M. (2019). Digital Trace and Critical Discourse Networking under Jokowi Government (2014-2018). *Central European Journal of International and Security Studies*, 13(4), 301–317. <https://cejiss.org/digital-trace-and-critical-discourse-networking-under-jokowi-government-2014-2018>
- Iannone, A. (2022). Democracy Crisis in South-East Asia: Media Control, Censorship, and Disinformation during the 2019 Presidential and General Elections in Indonesia, Thailand and 2019 Local Election in the Philippines. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 81–97. <https://doi.org/10.22146/jsp.71417>
- Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2), 180–197. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i2.225>
- Kartini, K., Ningrum, I. M., Sari, J. E., & Khoirunnisa, K. (2022). Penelitian tentang Facebook. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3(2), 146–153. <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/4472/1793>
- Kharlie, A. T., & Helmi, M. I. (2019). The role of the law on electronic information and transactions in overcoming challenges of democracy in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(20), 1178–1184. <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/3505>
- Kristiyanti, D. A., Normah, & Umam, A. H. (2019). Prediction of Indonesia Presidential Election Results for the 2019-2024 Period Using Twitter Sentiment Analysis. In *2019 5th International Conference on New Media Studies (CONMEDIA)*, 36–



42. Bali, Indonesia.
<https://doi.org/10.1109/CONMEDI A46929.2019.8981823>
- Latifa, R., Shaleh, A. R., Nyhof, M., & Rosyada, D. (2019). Indonesian Muslims' Political Disagreements on Social Media. In 2018 6th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM) 2018, 1–4. Parapat, Indonesia, 7–9 August 2018. <https://doi.org/10.1109/CITSM.2018.8674267>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Mahesa, P. B. N., & Irwansyah, I. (2022). Pengaruh Transformasi Digital dan New Media pada Perilaku Masyarakat di Ruang Digital. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(6), 843–856. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/508>
- Maksum, A., Surwandono, & Azizah, N. (2019). Media liberalization and its impact on Indonesian democratic society: Human security perspectives. *International Journal of Interdisciplinary Social Sciences*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.18848/1833-1882/CGP/v13i01/1-13>
- Masduki, R. (2021). Media Control in the Digital Politics of Indonesia. *Media and Communication*, 9(4), 52–61. <https://doi.org/10.17645/mac.v9i4.4225>
- Maulana, I. (2017). Social Media as Public Political Instrument. In Adria, M. & Mao, Y. (Eds), *Handbook of Research on Citizen Engagement and Public Participation in the Era of New Media*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1081-9.ch013>
- Maulana, I. (2019). Big brothers are seducing you: Consumerism, surveillance, and the agency of consumers. In Ozgen, O. (Ed), *Handbook of Research on Consumption, Media, and Popular Culture in the Global Age*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-8491-9.ch004>
- Maulana, I. (2020). Democracy, Technology, and Human Irresponsibility. In Kumar, V. & Malhotra, G. (Ed.) *Examining the Roles of IT and Social Media in Democratic Development and Social Change*, 1–21. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1791-8.ch001>
- Mietzner, M. (2012). Indonesia's democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization*, 19(2), 209–229. <https://doi.org/10.1080/13510347.2011.572620>
- Mietzner, M. (2018). Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2), 261–282. <https://doi.org/10.5509/2018912261>
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>

- Mietzner, M. (2021). Sources of resistance to democratic decline: Indonesian civil society and its trials. *Democratization*, 28(1), 161–178. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479–497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>
- Misran, Nurmandi, A., Mutiarin, D., Suswanta, & Salahudin. (2021). How Does Social Media Affect Money Politics Campaign Rejection in the 2020 Regional Head General Election Social Media? A Case Study of Indonesia. In Antipova, T. (eds) *Advances in Digital Science. ICADS 2021. Advances in Intelligent Systems and Computing*, 1352, 511–522. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71782-7_45
- Mudhoffir, A. M. (2023). The limits of civil society activism in Indonesia: The case of the weakening of the KPK. *Critical Asian Studies*, 55(1), 62–82. <https://doi.org/10.1080/14672715.2022.2123019>
- Munzir, A., Asmawi, & Zetra, A. (2019). Beragam Peran Media Sosial dalam Dunia Politik di Indonesia. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 173–182. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2691>
- Neyazi, T. A., Yi Kai Ng, A., Kuru, O., & Muhtadi, B. (2022). Who Gets Exposed to Political Misinformation in a Hybrid Media Environment? The Case of the 2019 Indonesian Election. *Social Media and Society*, 8(3), 1–14. <https://doi.org/10.1177/20563051221122792>
- Nugraha, Y., Rahayu, D., Budiman, T., & Febriana, D. H. (2022). Pemanfaatan Transformasi Digital dan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Kepada Masyarakat Desa Cibodas Kecamatan Cikajang. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 1(3), 23–33. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i3.1282>
- Power, T. P. (2018). Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>
- Prasetyo, H. (2021). Analisis Bibliometrik Pada Scholarly Journals Proquest Dengan Kata Kunci “Tourism In Indonesia” Menggunakan Perangkat Lunak VOSviewer. *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 12(1), 16–21. <https://doi.org/10.31294/khi.v12i1.9792>
- Rakhmani, I., & Saraswati, M. S. (2021). Authoritarian Populism in Indonesia: The Role of the Political Campaign Industry in Engineering Consent and Coercion. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(3), 436–460. <https://doi.org/10.1177/18681034211027885>



- Rastiya, A., & Hendriyani. (2020). The impact of citizen journalism engagement in Indonesian television on citizen journalists and society: A case study of the NET Citizen Journalist (NET CJ) programme. *Journal of Digital Media and Policy*, 11(1), 65–80. https://doi.org/10.1386/jdmp_00012_1
- Rusadi, U., & Priadji. (2023). Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(2), 581–588. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v3i3.2621>
- Sahide, A. (2022). Power Consolidation of Jokowi's Administration: The Role of the Social Media and Political Issues in Indonesian Democracy. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(1), 159–168. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0014>
- Salini, S. (2016). An introduction to bibliometrics. In Greenfield, T., & Greener, S. (Ed.), *Research Methods for Postgraduates*, Third Edition, 130–143. John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781118763025.ch14>
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology and Politics*, 18(4), 443–454. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Schäfer, S. (2015). Renegotiating Indonesian secularism through debates on Ahmadiyya and Shia. *Philosophy and Social Criticism*, 41(4–5), 497–508. <https://doi.org/10.1177/0191453714565502>
- Schäfer, S. (2019). Democratic decline in Indonesia: The role of religious authorities. *Pacific Affairs*, 92(2), 235–255. <https://doi.org/10.5509/2019922235>
- Septiani, D. (2019). Social media campaigns in Indonesia: How social media has transformed Indonesia's democratization process and political activity. *Journal of Digital Media and Policy*, 10(3), 329–343. https://doi.org/10.1386/jdmp_00006_1
- Seto, A. (2017). *Netizenship, activism and online community transformation in Indonesia*. Palgrave Macmillan Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-5397-9>
- Setyaningrum, W., Morana, A. C., Vaizi, K. N., Damarina, R., Akbar, S. A., & Oktasari, S. (2022). Anticipation of the ITE Law and Reconciliation of Its Forms Freedom of Expression through the E-Hights Website. *Jurnal Hukum Novelty*, 13(2), 266–276. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i2.a23799>
- Simarmata, S. (2014). Media Baru, Ruang Publik Baru, dan Transformasi Komunikasi Politik di Indonesia. *Jurnal Interact*, 3(2), 18–36. https://www.academia.edu/8855553/Media_Baru_Ruang_Publik_Baru_dan_Transformasi_Komunikasi_Politik_di_Indonesia
- Sukmayadi, V. (2019). The Dynamics of Media Landscape and Media Policy in Indonesia. *Asia Pacific Media Educator*, 29(1), 58–67. <https://doi.org/10.1177/1326365X19844853>

- Sumartias, S., Pulubuhu, D. A. T., Adi, A. N., & Ratnasari, E. (2023). Democracy in the Indonesian Digital Public Sphere: Social Network Analysis of Twitter Users' Responses to the Issue of Nationalism Knowledge Test at the Corruption Eradication Commission (TWK-KPK). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(3), 240–257. <https://doi.org/10.22146/jsp.70896>
- Suwana, F. (2020). What motivates digital activism? The case of the Save KPK movement in Indonesia. *Information Communication and Society*, 23(9), 1295–1310. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1563205>
- Suyanto. (2018). Indonesian media politics, on reform era from 1998 to 2010. *International Journal of Law and Management*, 60(6), 1485–1497. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-10-2017-0256>
- Syahputra, I. (2019). Expressions of hatred and the formation of spiral of anxiety on social media in Indonesia. *SEARCH Journal of Media and Communication Research*, 11(1), 95–112. <https://fslmjournals.taylors.edu.my/expressions-of-hatred-and-the-formation-of-spiral-of-anxiety-on-social-media-in-indonesia/>
- Syahputra, I., Riyanto, W. F., Pratiwi, F. D., & Virga, R. L. (2023). Escaping social media: The end of netizen's political polarization between Islamists and nationalists in Indonesia?. *Media Asia*, 51(1), 62–80. <https://doi.org/10.1080/01296612.2023.2246726>
- Talani, N. S., & Towadi, M. (2022). The paradox of information technology: Between freedom of speech and the legal threats behind visual criticism in Indonesia. *AIP Conference Proceedings*, 2573(1): 040007, 15 September 2022. <https://doi.org/10.1063/5.0104115>
- Tapsell, R. (2017). Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution. Rowman & Littlefield.
- Tapsell, R. (2021). Social Media and Elections in Southeast Asia: The Emergence of Subversive, Underground Campaigning. *Asian Studies Review*, 45(1), 117–134. <https://doi.org/10.1080/10357823.2020.1841093>
- Ufen, A. (2023). Civil Society and Efforts at Regime Change in Southeast Asia. In Eva Hansson, E., & Weiss, M. L. (Ed.), *Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia* (1st ed.), 101–117. <https://doi.org/10.4324/9780367422080-8>
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Winters, J. A. (2013). Oligarchy and Democracy in Indonesia. *Indonesia*, 96, 11–33. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0099>

